

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, M. I. (2021). *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. MCL Publisher.
- Dianti, F. (2024). *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHAP (Edisi Revisi)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Flora, H. S. (2026). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Kota Padang: CV Nusantara Press Indonesia.
- Fadhilah, N. (2023). *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Ishwara, A. S. S., Badilla, N. W. Y., Yuherawan, D. S. B., Priambada, B. S., Minabari, A., Kadir, Y., Santoso, A. D., & Hasanah, L. N. (2025). *Hukum Pembuktian Pidana*. Kota Tangerang: PT Adikara Cipta Aksa.
- Masidin, S. H. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.
- Mukhlis, Tarmizi, & Hadi, A. (2018). *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Muljohadi, R. A., & SH, M. HUKUM ACARA PIDANA. PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL
- Nawawi, B. (2022). *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Kota Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pujayanti, L. P. V. A., Rumalean, Z. Z., Rahmawati, R., Koswara, A., & Afrizal, M. (2025). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ramiyanto. (2018). *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasiwan, I. (2024). *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. AMU Press.
- Rudi Margono, S. H. (2026). *Prinsip Fair Trial Dalam Fungsi Penuntutan Kejaksaan RI: Antara Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM*. PROFESOR RUDI MARGONO.
- Rizkia, N. D., Nazmi, N., Mulyana, Y., Purba, T. L. D., Jayadi, H., Silalahi, F., ... & Saragi, P. (2025). HUKUM ACARA PIDANA BAB 6: PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA.
- Suteki, & Taufani, G. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Afriyanto, R., Gufron, A., Bawashir, A. S., & Kurniawan, A. R. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2).
- Agustin, M. T., & Ahmad, G. A. (2026). Batas Kewenangan Mahkamah Agung Sebagai *Judex Juris* Dalam Penilaian Fakta Hukum Pada Tingkat Kasasi Berdasarkan Pasal 253 KUHAP (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1466 K/Pid/2024). *Indonesian Journal Of Contemporary Law*, 3(5).
- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2).
- Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* Dalam Pembentukan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 877.
- Ardiansyah, R., Dudy, A. A., & Ashady, S. (2026). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Viktimologi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1).
- Ashari, A. (2017). Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana. *Al-Hikam*, 1(3).
- Basmala, S. A. (2025). Hukum Pembuktian Pidana Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Analisis Normatif, Filosofis, Dan Praktis. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(2).
- Barnas, M. D. (2021). Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019). *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 7(2).
- Capera, B. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(2).
- Damayanti, S. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1989/Pid.B/2020/PN Tng). *Jurnal IKAMAKUM*, 3(2).
- Delima, A. D., Sinurat, A., & Manuain, O. G. (2026). Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Implementasi Restitusi Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 45/Pid.Sus/2023/PN Bjw). *Student Research Journal*, 4(3).
- Diah, B. (2025). Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik. *Binamulia Hukum*, 14(1).

- Dilla, V. R., Safitri, N. B., & Yulianto, I. (2025). *Ratio Decidendi* Putusan Hakim Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby Dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang. *FENOMENA*, 19(1).
- Febriansyah, M. F., Mustaqim, T., Almunziri, P. A., Pratama, Y. A., & Utami, R. A. (2025). Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1).
- Hadi, M. D., Thalib, H., & Qamar, N. (2025). Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Legal Dialogica*, 1(1).
- Hakim, A. F., Tabranie, B. A., Rafsanajni, R., & Bahtiarasyah, M. R. A. (2025). Konsep Keadilan Retributif Dalam Penegakan Hukum: Tinjauan Dari Para Tokoh-Tokoh. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(1).
- Hasbi, F. R. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Kasus Nomor: 1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst). *Jurnal Pena Hukum*, 1(4).
- Halomoan Hsb., P. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. *Jurisprudencia*, 1(1).
- Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1).
- Ignatius Harbrian Hutomo, I. H., Thomas, T., & Wisnu Erlangga, W. E. (2014). Pengajuan Kasasi Atas Dasar Kewenangan Pengadilan. *Jurnal Verstek*, 2(3).
- Insani, N., & Octaviyanti, A. (2023). *Opzet* Sebagai Dasar *Mens Rea* Untuk Membedakan Delik Pembunuhan Dan Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Kematian. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Irtanti, N. D., Manuain, O. G., & Masu, R. R. (2026). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Mendapat Restitusi Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Rio Law Jurnal*, 7(1).
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP. *Lex Privatum*, 4(4).
- Loway, S. J. R., Koesoemo, A. T., & Bawole, H. (2022). Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 11(5).

- Manurung, I. C. (2025). Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5(5).
- Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). *Ratio Decidendi* Putusan, Jenis-Jenis Putusan, Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 3(1).
- Mayendra, M. C., Sukinta, & Utama, K. W. (2024). Tinjauan Tentang Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Kasasi Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 13(4).
- Mihot Lenardo, Ramadhani, N. A., & Panjaitan, J. D. (2025). Keterbatasan Jangkauan Dan Mekanisme Perlindungan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(2).
- Muchsin, A. (2024). Pertimbangan Hakim Terhadap Prinsip *In Dubio Pro Natura*: Kajian Putusan No. 359 K/TUN/TF/2023. *Jurnal Komisi Yudisial*, 17(1).
- Muttaqin, A., Herysta, E. A., Faisal, & Sadewa, P. P. (2023). Telaah asas *geen straf zonder schuld* terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan melalui modus ritual mistis. *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1).
- Nasution, S. I. (2025). *Mens Rea*: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Nita Yuniati. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 4(6).
- Nugroho, B. (2016). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1).
- Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(66).
- Poppy, Nailah, Govara, & Andryawan. (2024). Perspektif Yuridis Atas Kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri Keberlakuan Hukum Dalam Berkeadilan Melalui Peradilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2).
- Prameswari, N., Samirah, & Yuliati, S. W. (2015). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Verstek*, 3(2).
- Putra, A. D. R., Widodo, E., Handayati, N., & Ramadhanna, Y. K. (2026). Pertimbangan Non-Yuridis Hakim Dalam Perkara *Endorse* Judi Online Melalui Pendekatan *Socio-Legal*. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 24(1).
- Putri, O., & Priyana, P. (2025). Evaluasi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Perspektif

- Victimologi Pada Kasus Ronald Tannur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12B).
- Rahmadani, D. N. (2024). Pengaruh Asas *In Dubio Pro Reo* Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(10).
- Rahman, K., Suryoutomo, M., & Islam, M. S. (2025). Pengaruh Opini Publik Di Media Sosial Terhadap Independensi Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara (Perspektif *Rule Of Law* Dan *Rule Of Ethics*). *Jurnal JURISTIC*, 6(2), 139.
- Rampen, D. A. (2018). Kedudukan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHAP. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- Rifai, A., Nurwanto, S. D., & Asviyand, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau Dari Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Jurnal Lex Suprema*, 2(2).
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).
- Sasongko, P. T., & Wasahua, I. (2021). Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pembuktian Acara Pidana Dan Kewenangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Sebagai *Judex Juris* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/Pid/2020). *JCA Of Law*, 2(1).
- Sumendap, T., Lembong, R. R., & Taroreh, H. (2026). Pemenuhan hak restitusi (ganti rugi) bagi korban tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana. *Lex Crimen*, 15(3).
- Siburian, Y. (2025). Prinsip Pengajuan Barang Bukti Di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Profile Hukum*, 3(1).
- Simamora, J. (2014). Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012. *Jurnal Yudisial*, 7(1).
- Setyowati, V. T., & Septiningsih, I. (2024). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Verstek*, 12(2).
- Siregar, P. E., & Debora. (2024). Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Pada Pengadilan Negeri Tarutung). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3).
- Soa, A. H. (2023). Pergeseran Paradigma Asas Legalitas Dalam Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal Justiciabelen*, 3(2).
- Sulistyono, M. P., Ramadani, A. S., Ramadhani, A., Apriansa, T., Ananta, T., & Fitri, R. (2024). Eksistensi Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Indonesian Journal Of Law*, 1(10).

- Syuhada, L. N., & Santoso, B. (2021). Kajian Pertimbangan *Judex Juris* Menjatuhkan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Atas Dasar *Dissenting Opinion* Dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1756 K/Pid.Sus/2017). *Jurnal Verstek*, 9(1).
- Valencia, D., Andini, M. N., Aditya, R., & Utami, R. A. (2026). Korban Sebagai Subjek, Bukan Objek Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Media Hukum Indonesia*, 4(2).
- Yanti, S., Hidayat, H., & Muhibuddin, M. (2025). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).
- Zaidun, Z., & Setiyono, J. (2024). Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1).

Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait Perubahan atas Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Putusan Mahkamah Agung No. 1466K/P/2024/PN.Sby.

Internet

Permata, Astrid. (n.d.). "Rilis Pers – Indonesia Femicide Watch: Remisi Ronald Tannur dan Luputnya Perspektif Korban dalam Putusan Kasasi: Ketidakpekaan Negara terhadap Keadilan Korban Femisida." *Jakarta Feminist*. Diakses 10 Juni 2025, dari <https://jakartafeminist.com/rilis-pers-indonesia-femicide-watch-remisi-ronald-tannur-dan-luputnya-perspektif-korban-dalam-putusan-kasasi-ketidakpekaan-negara-terhadap-keadilan-korban-femisida/>.